

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, UKURAN DEWAN DIREKS  
PROPORSI DIREKTUR INDEPENDEN TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN  
SUKARELA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar*

*Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi*

*Universitas Negeri Padang*



**Oleh :**

**RIDWAN**

**15043031/2015**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, UKURAN DEWAN DIREKSI,  
DAN PROPORSI DIREKTUR INDEPENDEN TERHADAP TINGKAT  
PENGUNGKAPAN SUKARELA**

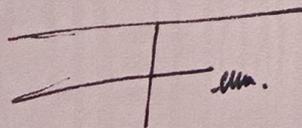
Nama : Ridwan  
BP/NIM : 2015/15043031  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Keuangan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Disetujui Oleh:

Ketua Prodi Akuntansi

Pembimbing,



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc  
NIP. 1984013 200912 2 005

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

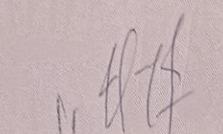
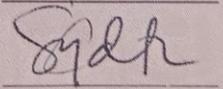
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, UKURAN DEWAN DIREKSI,  
DAN PROPORSI DIREKTUR INDEPENDEN TERHADAP TINGKAT  
PENGUNGKAPAN SUKARELA**

Nama : Ridwan  
BP/NIM : 2015/15043031  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Keuangan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

**Tim Penguji**

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	
2. Anggota : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
3. Anggota : Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan  
NIM/Tahun Masuk : 15043031/2015  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 08 Mei 1995  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Keuangan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Kebun Nona RT 05 RW 5 Komp. Kehakiman Kel. Cengkeh  
Nan xx Kec. Lubuk Begalung Padang  
No. HP/Telp : 087792770090/-  
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Ukuran Dewan  
Direksi dan Proporsi Direktur Independen Terhadap  
Tingkat Pengungkapan Sukarela

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2019



**Ridwan**  
15043031/2015

## ABSTRAK

**Ridwan. (15043031/2015). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Ukuran Dewan Direksi, dan Proporsi Direktur Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela.**

**Pembimbing : Mayar Afriyenti, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga, ukuran dewan direksi, dan proporsi direktur independen terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, terdapat 57 perusahaan sebagai sampel penelitian. Kepemilikan keluarga diukur dengan persentase kepemilikan saham, ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah dewan direksi perusahaan, proporsi direktur independen diukur dengan persentase direktur independen pada struktur dewan dan pengungkapan sukarela diukur dengan Indeks pengungkapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, dan Proporsi direktur independen berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

**Kata Kunci : Kepemilikan Keluarga, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Direktur Independen, Tingkat Pengungkapan Sukarela**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Ukuran Dewan Direksi, dan Proporsi Direktur Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak dan Ibu sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku penguji yang telah mmberikan banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak fefri indra arza. SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA).

5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Elidar, ayahanda tercinta Sambasri, Kakanda tersayang Syaiful Efendi, Adinda Kori Ahti dan Dodi Ramadhan serta keluarga penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Minda Susanti dan keluarga, Ibu Prof. Dr. Dra. Yetria Rilda, MS dan keluarga serta Bapak Medy Yulian, Ibu Susi Utami dan keluarga yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Akuntansi BP 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Khususnya Kepada rekan F5: Doni Kurniawan, Esi Rahmadini, Mutiara Sari dan Tabah Riski.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ingin mengucapkan terimakasih. Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu serta rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Padang, September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Kajian Teori .....	14
1. Teori Keagenan .....	14
2. Pengungkapan .....	17
a. Fungsi dan tujuan pengungkapan .....	18
b. Luas Pengungkapan .....	20
3. Pengungkapan Sukarela .....	22
4. Struktur Kepemilikan .....	24
5. Ukuran Dewan Direksi .....	28
6. Proporsi Direktur Independen .....	29
B. Penelitian Yang Relevan .....	31
C. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis Penelitian .....	34
1. Pengaruh Kepemilikan Saham Keluarga Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela .....	34
2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela .....	35
3. Pengaruh Proporsi Direktur Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela .....	36

D. Kerangka Konseptual .....	37
------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Populasi dan Sampel .....	39
B. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	42
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	42
D. Teknik Analisis Data .....	46
1. Analisis Deskriptif .....	46
2. Uji Asumsi Klasik .....	46
3. Uji Hipotesis .....	48
E. Uji Kelayakan Model .....	49
F. Defenisi Operasional .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur .....	52
B. Deskriptif Variabel Penelitian .....	53
1. Tingkat Pengungkapan Sukarela .....	53
2. Kepemilikan Keluarga .....	58
3. Ukuran Dewan Direksi .....	63
4. Proporsi Direktur Independen .....	66
C. Statistik Deskriptif .....	69
D. Analisis Data .....	70
1. Uji Asumsi Klasik .....	70
a. Uji Normalitas .....	70
b. Uji Multikolinearitas .....	71
c. Uji Heterokedastisitas .....	72
d. Uji Autokorelasi .....	73
2. Model Regresi Berganda .....	74
a. Konstanta ( $\alpha$ ) .....	75
b. Koefisien Regresi (B) FOWN .....	75
c. Koefisien Regresi (B) DSIZE .....	76
d. Koefisien Regresi (B) INDIR .....	76

3. Uji Kelayakan Model .....	76
a. Uji determinasi ( $R^2$ ) .....	76
b. Uji F Statistik .....	77
c. Uji Hipotesis (Uji t).....	78
E. Pembahasan.....	79
1. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela.....	79
2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela.....	81
3. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela.....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	85
B. Keterbatasan Penelitian.....	86
C. Saran .....	87
<b>Daftar Pustaka</b> .....	88
<b>Lampiran</b> .....	93

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Kategori Tingkat Pengungkapan Sukarela .....	22
2. Daftar Item Pengungkapan Sukarela.....	23
3. Penelitian Yang Relevan.....	31
4. Kriteria Pemilihan Sampel .....	40
5. Daftar Sampel Perusahaan .....	40
6. Indeks Pengungkapan Sukarela Perusahaan Sampel .....	55
7. Kepemilikan Keluarga Perusahaan Sampel .....	60
8. Ukuran Dewan Direksi Perusahaan Sampel .....	64
9. Proporsi Direktur Independen Perusahaan Sampel.....	66
10. Hasil statistik deskriptif .....	69
11. Hasil uji normalitas .....	71
12. Hasil uji multikolinearitas .....	72
13. Hasil uji heterokedastisitas.....	73
14. Hasil uji autokorelasi .....	74
15. Hasil uji regresi berganda .....	75
16. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).....	76
17. Hasil uji f statistik .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Konseptual .....	37
------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Tabel Pemilihan Sampel .....93
2. Hasil Olahan Data Dengan Program SPSS .....98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pasar modal Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Salah satu indikator untuk menilai peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengungkapkan jumlah investor pasar modal tumbuh signifikan sepanjang tahun 2018 yang terlihat dari jumlah *Single Investor Identification* (SID) hingga akhir Desember 2018 mencapai 1,61 juta, atau meningkat 44,06% dari akhir tahun 2017. Peningkatan jumlah investor tentu akan diiringi dengan peningkatan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk dapat mengambil keputusan apakah investor akan menambah portofolionya atau sebaliknya mengurangi portofolionya terhadap kepemilikan suatu perusahaan.

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan merupakan sekumpulan kontrak antara berbagai pihak yg terlibat di dalamnya. Teori tersebut menggantikan model klasik perusahaan dengan kepemilikan tunggal yang merangkap sebagai pemilik dan pengelola perusahaan (Fama, 1980). Dalam teori keagenan terdapat hubungan keagenan yaitu suatu kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dengan mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Karena pihak-pihak yang terikat dalam kontrak merupakan individu yang rasional, maka masing-masing pihak akan

berupaya untuk memaksimalkan keuntungannya masing-masing sehingga muncul konflik keagenan.

Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Namun, di sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, hal tersebut menyebabkan agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik dari *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kuantitas dan kualitas informasi yg dimiliki oleh masing-masing pihak. Kondisi dimana manajer memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan dalam kuantitas dan kualitas yang lebih baik daripada informasi yang dimiliki oleh pemegang saham (Scott, 2009).

Informasi yang dibutuhkan investor dapat diperoleh dari laporan-laporan perusahaan seperti laporan keuangan dan laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan salah satu laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menyampaikan kinerja dan strategi perusahaan. Seiring dengan peningkatan kebutuhan informasi, Perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga akan lebih membantu para pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah (Chau dan Gray, 2010).

Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan penting bagi semua pemangku kepentingan. Laporan tahunan pada dasarnya adalah sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dalam pasar modal, juga sebagai sarana

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pelaporan kegiatan ekonomi organisasi harus jelas dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua pemangku kepentingan untuk mengurangi ketidakpastian. Pendekatan ini membantu para pemangku kepentingan membuat keputusan ekonomi dan keuangan yang sesuai.

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan adalah komunikasi formal tradisional dan wajib antara organisasi pelapor dan pengguna (Sharma dan Davey, 2013). Pengungkapan pada laporan tahunan terdiri dari pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah informasi wajib yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 dan pengungkapan sukarela merupakan setiap informasi tambahan yang diungkapkan di luar pengungkapan wajib yang tidak diatur dan disediakan secara sukarela oleh manajemen (Syeliya *et al.*, 2018). Dalam pengungkapan ini, laporan tahunan dapat mencakup informasi yang dapat membantu para penyusun (perusahaan) dan pengguna (*stakeholder*) dalam memahami kinerja perusahaan. Selain itu, pengungkapan dapat mencerminkan status operasional, struktural, dan keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Pengungkapan informasi pada laporan tahunan yang dipraktikkan oleh perusahaan hanya didominasi oleh pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh Peraturan OJK (Yesi, 2015). Namun, pengungkapan informasi yang bersifat sukarela masih jarang diungkapkan oleh perusahaan karena tidak adanya peraturan yang mengaturnya. Disisi lain, investor membutuhkan berbagai

informasi yang untuk pengambilan keputusan investasi guna meminimalkan risiko sehingga tidak cukup hanya dengan pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan (Chau dan Gray, 2010).

Penelitian terbaru oleh para peneliti seperti Chau dan Gray (2010), Elfeky (2017), Jankensgard (2017), Allaya *et al.*, (2018), dan Zaini *et al.*, (2018) tentang pengungkapan sukarela menunjukkan bahwa berbagai bursa di seluruh dunia mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan mereka. Pengungkapan sukarela bertujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada para pemangku kepentingan tentang kegiatan perusahaan yang tidak terdapat dalam laporan keuangan, menurunkan asimetri informasi dan komunikasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan (Chau dan Gray, 2010). Praktik pengungkapan sukarela adalah hak prerogatif dan keputusan dewan direksi, kualitas dan kuantitas informasi tambahan yang disediakan dalam laporan tahunan perusahaan sering kali tidak memadai dan tidak mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (Yekini *et al.*, 2015). Comyns *et al.*, (2013) berpendapat bahwa pelaporan perusahaan yang berkualitas dapat mengarah pada keberlanjutan jangka panjang suatu organisasi di pasar modal.

Pengungkapan sukarela merupakan sarana penting untuk membedakan antara perusahaan yang baik dan yang buruk bagi investor, karena ketiadaan informasi dianggap dekat dengan berita buruk, dan pengungkapan sukarela dapat membantu investor untuk membuat keputusan menggunakan informasi di luar laporan keuangan berupa manajemen risiko, kebijakan, maupun prospek

perusahaan di masa yang akan datang (Ferdinal, 2012). Menurut Ferdinal (2012) Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih cenderung rendah.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak menyampaikan keterbukaan informasi baik melalui laporan keuangan, *prospectus* dan pergerakan saham yang tidak wajar adalah dengan melakukan penghentian perdagangan saham sementara (*suspensi*) terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap keterbukaan informasi. Tindakan tersebut dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan melakukan penghentian perdagangan saham sementara terhadap 9 perusahaan ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Hal tersebut dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) agar tercapainya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah *go public*.

Penelitian mengenai Pengungkapan informasi secara sukarela yang dilakukan oleh perusahaan penting untuk dilakukan, hal ini dikarenakan investor sangat bergantung kepada informasi yang diungkapkan oleh perusahaan melebihi dari informasi pengungkapan wajib untuk melakukan pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan (Syeliya *et al.*, 2018). Meskipun kecukupan informasi yang diterima investor sangat bergantung pada luasnya pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, namun luasnya pengungkapan sukarela sangat dipengaruhi oleh kepemilikan dari perusahaan (Syeliya *et al.*, 2018).

Timbulnya struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan upaya untuk mempertahankan hak – hak pemilik saham dengan mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan yang mengakibatkan munculnya kontrol untuk mengatur kebijakan manajemen (Ferdinal, 2012). Perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan keluarga dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga pendirinya (Syeliya *et al.*, 2018). Menurut Bertrand dan Schoar (2006) perusahaan keluarga ditandai dengan adanya kepemilikan terkonsentrasi, kontrol, dan adanya satu atau beberapa anggota keluarga yang menduduki posisi eksekutif.

Posisi dewan direksi (eksekutif) yang telah diisi oleh pihak – pihak yang erat kaitannya dengan pemegang saham pengendali yaitu dalam hal ini pihak keluarga. Hal tersebut membuat kebijakan perusahaan dapat berada sepenuhnya di bawah kendali pemegang saham pengendali, sehingga tidak terdapat konflik keagenan di antara manajemen dengan pemegang saham (Syeliya *et al.*, 2018). Namun, fenomena tersebut malah mengakibatkan bergesernya konflik keagenan menjadi konflik kepentingan antara pemilik saham pengendali dengan pemilik saham nonpengendali (minoritas) dikarenakan munculnya asimetri informasi sehingga dapat menimbulkan rendahnya kepercayaan investor terhadap perusahaan yang konsentrasi kepemilikan keluarga yang tinggi (Chau dan Gray 2010).

Faktor kepemilikan keluarga dipilih dengan alasan bahwa Perusahaan yang dikendalikan keluarga memiliki sedikit motivasi untuk mengungkapkan

informasi yang melebihi pengungkapan wajib karena permintaan keterbukaan informasi publik relatif lemah pada perusahaan yang kepemilikan saham terkonsentrasi (kepemilikan keluarga) dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan saham yang menyebar (Syeliya *et al.*, 2018). Hal tersebut dikarenakan anggota keluarga memiliki akses langsung terhadap informasi keuangan maupun non keuangan sehingga mereka kurang membutuhkan pengungkapan (Zaini *et al.*, 2018).

Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan serangkaian mekanisme yang terdiri dari struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Ferdinal, 2012). Menurut Ferdinal (2012) Penerapan dan pengelolaan *good corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan.

Dewan direksi merupakan salah satu atribut dari *good corporate governance*. Dewan direksi dalam perusahaan mempunyai tugas dan bertanggungjawab secara legal dalam mengambil suatu keputusan sesuai tugas dan wewenang dari masing-masing dewan direksi (cheng dan Courtenay, 2006). suatu perusahaan, terdapat salah satu Direktur Utama yang mengkoordinasikan

kegiatan direksi, agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif. Menurut Gandia (2008) faktor penting yang dirasakan mempengaruhi efektifitas dewan direksi adalah ukuran. Ukuran dewan direksi yang besar memungkinkan beragam pengalaman dan pendapat yang berpotensi meningkatkan kapasitas pengawasan dewan, sehingga menyiratkan pengungkapan lebih sukarela (Gandia, 2008).

Teori agensi menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi yang besar dapat memainkan peran penting dalam memantau dewan direksi dan dalam membuat keputusan jangka panjang (Elfeky, 2017). Selain itu, jumlah dewan direksi yang besar menyebabkan peningkatan variasi keahlian di dewan termasuk keahlian pelaporan keuangan (Laksmana, 2008). Ukuran dewan direksi yang besar memungkinkan beragam pengalaman dan pendapat yang berpotensi meningkatkan kapasitas pengawasan dewan, sehingga menyiratkan pengungkapan lebih sukarela (Gandia, 2008 ).

Perusahaan dengan dewan direksi skala besar kemungkinan akan secara sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan mereka di setiap tahun dan situs *website* (Elfeky, 2017). Sebaliknya, Cheng dan Courtenay (2006) berpendapat bahwa ukuran dewan direksi yang besar mungkin akan memiliki efek negatif terhadap kinerja dewan direksi. Penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan direksi terhadap tingkat pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya tetapi dengan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Penelitian sebelumnya menemukan korelasi positif antara ukuran dewan direksi dan tingkat pengungkapan sukarela (Sahama *et al.*, 2014;

Allegrini dan Greco, 2013; Barako *et al.*, 2006). Namun, penelitian empiris lainnya ( Arcay dan Vazquez, 2005; Manuel, 2010) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara kedua variabel.

Penerapan *good corporate governance* yang baik ditandai dengan adanya direktur independen. Direktur independen merupakan direktur non-eksekutif yang memiliki tugas mengawasi jalannya perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas (Uyar *et al.*, 2014). Proporsi direktur independen yang lebih tinggi pada struktur dewan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela (Chau dan Gray, 2010). Proporsi direktur independen yang lebih tinggi di struktur dewan kemungkinan akan menghasilkan tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi (Chau dan Leung, 2006).

Direktur independen dianggap sebagai “wasit profesional yang tugasnya adalah untuk merangsang dan mengawasi persaingan di antara manajemen puncak perusahaan” (Fama, 1980). Proporsi direktur independen yang lebih tinggi di struktur dewan perusahaan harus menghasilkan pemantauan oportuniste manajerial yang lebih efektif (Chau dan Leung, 2006). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dewannya didominasi oleh direktur yang independen diharapkan untuk mengungkapkan banyak informasi yang lebih sukarela.

Proporsi dari direktur independen yang lebih tinggi di dewan perusahaan harus menghasilkan pemantauan oportuniste manajerial yang lebih efektif (Chau dan Leung, 2006). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dewannya didominasi oleh direktur independen diharapkan untuk

mengungkapkan banyak informasi dengan lebih sukarela. Hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten dalam kaitannya dengan hubungan antara proporsi direktur independen di struktur dewan dan tingkat pengungkapan sukarela. Dengan demikian, peneliti berharap direktur independen untuk memberikan pengaruh yang lebih besar pada keputusan manajemen dalam mengungkapkan informasi secara sukarela kepada investor luar ketika proporsi mereka di dewan lebih tinggi.

Pada konteks penerapan dan pengawasan *good corporate governance* di Indonesia, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan tidak adanya pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran mengakibatkan perusahaan-perusahaan cenderung mengabaikan untuk memenuhi kewajiban dalam memiliki direktur independen (Laksmiana, 2008). Hal tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki direktur independen sehingga dapat mengurangi pengawasan dan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak direktur independen di dewan memiliki banyak pengungkapan sukarela (Chau dan Gray, 2010; Uyar *et al.*, 2014; Elfeky, 2017). Namun, beberapa peneliti tidak menemukan hubungan yang signifikan antara tingkat pengungkapan sukarela dan independensi dewan (Ghazali dan Weetman, 2006; Alves *et al.*, 2012). Peneliti lain menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara pengungkapan sukarela dan independensi dewan (Khalldon, 2015).

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan keluarga, ukuran dewan direksi, dan proporsi direktur non-eksekutif independen terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang peneliti digunakan masih jarang digunakan dalam penelitian tentang pengungkapan sukarela yang ada di Indonesia dan penelitian sebelumnya dilakukan terhadap perusahaan di luar Indonesia. Peneliti tidak menemukan penelitian sejenis yang dilakukan terhadap perusahaan di Indonesia. Kemudian, penelitian sebelumnya mayoritas menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur variabel dependen sementara peneliti menggunakan pengukuran indeks pengungkapan sukarela yang dikembangkan oleh Oliveira dan Rodrigues (2006) dan Alves *et al.*, (2012) yang terinspirasi dari penelitian sebelumnya yaitu Botosan (1997). Indeks pengungkapan sukarela ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya suatu item yang diungkapkan tetapi juga melihat apakah informasi yang diungkapkan memiliki rincian atau tidak.

Penelitian tentang tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan seiring dengan tingginya perkembangan pasar modal di Indonesia. Penelitian itu akan memberikan gambaran tentang sifat perbedaan kualitas pengungkapan sukarela antar perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dapat memberikan petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan. Penelitian ini menggunakan perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 sebagai sampel.

Alasan pemilihan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur lebih banyak mendapatkan perhatian publik terkait dengan produk yang dihasilkan sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dan perusahaan manufaktur lebih dominan dari pada industri lainnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti mengenai tingkat pengungkapan sukarela. Penulis mengambil judul “Pengaruh kepemilikan keluarga, Ukuran Dewan Direksi, dan Proporsi Direktur Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela” (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela?
3. Apakah proporsi direktur independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis terhadap hal-hal berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
3. Bagaimana pengaruh proporsi direktur independen terhadap tingkat pengungkapan sukarela

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama perkuliahan dan merupakan media latihan dalam memecahkan masalah secara ilmiah. Dari segi ilmiah, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan yang disajikan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk mengembangkan penyusunan peraturan yang berlaku dalam rangka menciptakan pasar modal yang transparan.

**BAB II**

**KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN**

**KERANGKA KONSEPTUAL**

**A. Kajian Teori**

**1. Teori Keagenan**

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori yang mendasari penelitian tentang tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Teori keagenan adalah teori yang membahas perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Konsekuensi akibat perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan manajer (agen) memilih sikap berhati-hati dalam pengambilan keputusan perusahaan yang dapat berpengaruh pada perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa ada kemungkinan manajer menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingannya sendiri dan mengorbankan pemegang saham. Oleh sebab itulah biaya keagenan mengurangi kinerja perusahaan. Dalam prinsip teori keagenan, Dewan komisaris dibentuk untuk mengawasi perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983). Berle dan Means (1932) dalam Chung *et al.*, (2015) juga telah berpendapat bahwa dalam perusahaan *modern* konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan investor sebagai prinsipal akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena struktur kepemilikan pada perusahaan *modern* cenderung menyebar sehingga variasi kepentingan dalam perusahaan semakin banyak.

Investor biasanya tergantung pada informasi yang diungkapkan oleh manajer perusahaan dalam laporan tahunan. Dari sudut pandang manajer, semua informasi yang berguna untuk pengoptimalan fungsi pasar modal akan diungkap karena mereka memiliki intensif untuk menjaga harga saham perusahaan dari kerugian (Hendriksen dan Brenda, 1992 dalam Arifin, 2003). Masalah agensi akan muncul ketika investor membutuhkan informasi yang cukup untuk perkiraan perusahaan di masa yang akan datang, tetapi manajemen perusahaan tidak mengungkap informasi tersebut dalam laporan tahunan. Situasi ini, dalam literatur hubungan agensi dikenal sebagai informasi asimetri. Keberadaan dari informasi asimetri dalam hubungan agen-prinsipal dapat diterima dalam literatur dan ini telah menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Keputusan manajer untuk mengungkap atau tidak mengungkapkan informasi tersebut tergantung pada situasi yang dihadapi oleh manajer.

### **Konflik Keagenan**

Asimetri informasi yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan sebagai agen dalam hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan agen karena adanya perbedaan kepentingan dan masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing (Jensen & Mckling, 1976). Alijoyo & Zaini (2004), memaparkan bahwa konflik keagenan dapat timbul dalam hal – hal berikut :

a. *Moral Hazard*

Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

b. *Earning Retention*

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih memilih distribusi kas yang lebih tinggi melalui peluang investasi internal yang positif.

c. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung mengambil posisi yang aman secara pribadi dan masih dalam batas kemampuan dalam mengambil keputusan investasi. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah risiko bagi perusahaan walaupun mungkin hal itu bukan pilihan terbaik bagi perusahaan.

d. *Time – Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan di dalam masa jabatan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan Pemilik perusahaan akan selalu berusaha untuk menghilangkan adanya perbedaan kepentingan dengan agen dengan cara memberikan insentif yang sesuai, serta melakukan pengawasan untuk membatasi tindakan *agent* agar *agent* tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan kepentingan pemilik perusahaan. Walaupun begitu, *agent* tetap dapat melakukan

pembuatan keputusan yang tidak memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham karena *agent* dapat melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan kebijakan – kebijakan yang disampaikan oleh pemilik perusahaan (Wallace & Zinkin, 2005). Hal – hal tersebut diatur di dalam hubungan kontraktual antara pemilik dan manajer (*agent*) sehingga hubungan kontraktual perusahaan dapat menjadi alat untuk mengurangi perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Biaya – biaya yang timbul sebagai akibat dari usaha pemilik untuk mengurangi konflik kepentingan dinamakan biaya keagenan.

## **2. Pengungkapan (*disclosure*)**

Kata pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Jika dikaitkan dengan laporan tahunan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan tahunan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Sudarmadji dan Sularto (2007) mengatakan secara sederhana, pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Informasi yang diungkapkan harus jelas, lengkap, berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah

pengungkapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan dalam peraturan pasar modal yang berlaku. Peraturan mengenai laporan tahunan perusahaan yang *go-public* di Indonesia diatur jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa laporan tahunan emiten merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat :

- a. Iktisar data keuangan penting;
- b. Informasi saham (jika ada);
- c. Laporan Direksi;
- d. Laporan Dewan Komisaris;
- e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Analisis dan pembahasan manajemen;
- g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

**a. Fungsi dan Tujuan Pengungkapan**

Dalam buku teori akuntansi perikayaan laporan keuangan (suwardjono, 2014) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya. Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama perolehan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

#### 1) Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan pengungkapan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

#### 2) Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

### 3) Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan penganwas berdasarkan peraturan melalui fomulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Perusahaan harus memperhatikan pengungkapan yang dilakukannya, karena hal itu berpengaruh terhadap hubungan jangka panjang dengan para pengguna laporan keuangan. Perusahaan harus mengetahui pula bagaimana pengungkapan dilakukan didalam laporan keuangan atau harus memahami konsep-konsep pengungkapan yang ada. Emiten sering kali menyembunyikan berbagai informasi penting yang sebenarnya dibutuhkan investor demi kepentingan perusahaan, padahal seharusnya emiten menyadari bahwa sebenarnya setelah perusahaan *go public* mereka harus lebih terbuka. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kurangnya pengetahuan emiten tentang kebutuhan para investor atau karena tingginya biaya pelaporan.

#### **b. Luas Pengungkapan**

Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of disclosure*). Suwardjono (2014) mengidentifikasikan tiga pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu :

- 1) *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup)

Pengungkapan cukup merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2) *Fair disclosure* (pengungkapan wajar)

Pengungkapan wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3) *Full disclosure* (pengungkapan penuh)

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Suwardjono (2014) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif.

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui luas pengungkapan sukarela adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan persentase maksimal yaitu 100%
- 2) Menentukan persentase minimal yaitu 0%
- 3) Menentukan rentang persentase (r%) diperoleh dari pengurangan persentase maksimal terhadap persentase minimal, maka didapat  $100\% - 0\% = 100\%$
- 4) Menentukan kriteria kurang luas, cukup luas, luas dan sangat luas

5) Menentukan interval kelas persentase, diperoleh dari pembagian rentang persentase terhadap kriteria , maka didapat  $100\% : 4 = 25\%$

Dengan demikian tabel kategori untuk luas pengungkapan sukarela (Y) adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Kategori Tingkat Pengungkapan Sukarela**

No	Rentang	Kriteria
1	75% - 100%	Sangat luas
2	50% - 74%	Luas
3	25% - 49%	Cukup luas
4	0% - 24%	Kurang luas

Sumber : Umi Maskhiyah, (2009)

### 3. Pengungkapan Sukarela

Yesi (2015) menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan.

Pengungkapan sukarela dapat menambah kelengkapan informasi dalam memahami kegiatan operasional perusahaan publik dan menunjukkan adanya ketransparanan keadaan perusahaan yang sebenarnya terhadap pengguna laporan keuangan. Pengungkapan-pengungkapan ini meliputi gambaran strategi perusahaan jangka panjang, indikator-indikator non keuangan penting dan informasi keuangan yang bermanfaat untuk keefektifitasan implementasi strategi perusahaan (Chau dan Gray, 2010).

**Tabel 2. Daftar Item Pengungkapan Sukarela**

No	Item Pengungkapan Sukarela
1	Uraian strategi dan tujuan perusahaan; meliputi tujuan umum, keuangan, pemasaran dan sosial.
2	Uraian dampak dari strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa datang.
3	Bagan atau uraian pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi.
4	Uraian program reset dan pengembangan; meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan dan hasil yang dicapai.
5	Informasi analisis pesaing, baik kualitatif maupun kuantitatif
6	Informasi manajer senior; meliputi nama, pengalaman dan tanggung jawabnya.
7	Uraian kebijakan-kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen.
8	Informasi mengenai nilai tambah baik kualitatif maupun kuantitatif.
9	Uraian dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang.
10	Informasi kemungkinan litigasi oleh pihak lain terhadap perusahaan dimasa yang akan datang.
11	Informasi pihak-pihak yang memperoleh kepemilikan substansial terhadap saham perusahaan.
12	Informasi kepala audit internal; meliputi nama, pengalaman dan tanggung jawabnya.
13	Struktur kepemilikan perusahaan dalam bentuk bagan.
14	Uraian kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau akan dilaksanakan.
15	Informasi pesanan pembelian yang belum terpenuhi dan kontrak penjualan yang akan direalisasikan masa depan.
16	Ringkasan statistik keuangan; meliputi rasio rentabilitas, likuiditas dan solfabilitas untuk lima tahun atau lebih.
17	Laporan yang memuat elemen-elemen laba rugi yang diperbandingan untuk 3 tahun atau lebih.
18	Laporan yang memuat elemen-elemen neraca yang diperbandingan untuk 3 tahun atau lebih.
19	Informasi merinci mengenai jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan; meliputi gaji atau upah, tunjangan dan pemotongan.
20	Informasi biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap dan variabel.
21	<i>Expected Return</i> yang diharapkan terhadap proyek yang dilaksanakan.
22	Informasi harga saham untuk setiap masa tri wulan untuk 3 tahun atau lebih.
23	Informasi proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya baik kualitatif maupun kuantitatif.

24	Informasi proyeksi jumlah laba tahun berikutnya baik kualitatif maupun kuantitatif.
25	Informasi proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya baik kualitatif maupun kuantitatif.
26	Uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang sama tanpa memandang suku, agama dan ras.
27	Uraian kondisi kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja.
28	Uraian permasalahan dalam rekrutmen tenaga kerja.
29	Informasi level atau fisik output dan pemakaian kapasitas yang dicapai oleh perusahaan masa sekarang.
30	Uraian dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kebijakan untuk memelihara lingkungan.
31	Informasi mengenai komposisi karyawan.
32	Informasi mengenai sistem komunikasi dan informasi perusahaan.
33	Uraian mengenai ringkasan keputusan hasil rapat umum pemegang saham tahunan.

*Sumber : sehar et al., (2013) dalam Yesi (2015) dan Umi (2009)*

#### **4. Struktur Kepemilikan**

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan hubungan dari pemisahan kepemilikan dan pengendalian pada perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara penuh oleh seorang pemilik, maka keputusan operasional perusahaan akan memaksimalkan kepentingan pemilik. Saat perusahaan memerlukan tamahan dana dan menjual klaim atas modal perusahaan kepada publik atau pihak lain, hal tersebut akan terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan dan memiliki perbedaan antara kepentingan manajer (pemilik) dengan kepentingan pemegang saham lain. Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan-perusahaan di negara lain, sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri dapat menduduki sebagai dewan direksi maupun komisaris (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).

Menurut Sugiarto (2009) struktur kepemilikan merupakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh investor dalam perusahaan, atau dengan kata lain struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan saham yang terdapat di dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh keluarga, pemerintah, instansi maupun pihak asing. Perbedaan dalam jumlah saham yang dimiliki investor dapat mempengaruhi luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka semakin tinggi motivasi mereka untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas.

### **Kepemilikan Keluarga**

Kepemilikan keluarga merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak keluarga pada perusahaan. Menurut Sugiarto (2009) perusahaan keluarga didefinisikan sebagai bentuk perusahaan dengan kepemilikan dan manajemen yang dikelola dan dikontrol oleh pendiri atau anggota keluarganya atau kelompok yang memiliki pertalian keluarga, baik yang tergolong keluarga inti atau perluasannya (baik yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan).

Suatu perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga jika keluarga tersebut merupakan *controlling stakeholder* atau mempunyai saham setidaknya 20% dari *voting right* dan merupakan pemilik saham tertinggi dibandingkan dengan *shareholders* lainnya (Zaini *et al.*, 2018). Perusahaan publik di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan-

perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh keluarga (claessens,1999). Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kontrol tetap dipegang oleh keluarga dan masih begitu signifikan.

Pada awalnya, perusahaan keluarga merupakan perusahaan tertutup dan mendanai kegiatan usahanya dengan modal sendiri dan didukung oleh pinjaman pihak luar. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan pasar modal, banyak dari perusahaan yang dikategorikan sebagai kepemilikan keluarga ini kemudian menjadi perusahaan terbuka. Dengan menjadi perusahaan terbuka, maka rasio dan profit dari perusahaan menjadi terbagi dengan pihak luar. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh lebih banyak dana dan melakukan ekspansi usahanya dengan menjadi perusahaan terbuka (Ayub, 2008). Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat menggunakan tingkat pengendalian yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi pada beban yang ditanggung oleh pemegang saham minoritas.

Perusahaan dengan kepemilikan keluarga sering menjadi sengketa kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Sengketa kepentingan pada perusahaan ini disebabkan karena pemegang saham mayoritas umumnya memiliki kontrol yang sangat besar terhadap perusahaan tersebut. Claessens *et al.*, (1999) menyatakan bahwa kontrol ini dilakukan melalui struktur piramida dan kepemilikan silang (*crossholding*) di antara beberapa perusahaan. Model ini sangat umum terjadi di semua Negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Tabalujan (2002) beranggapan bahwa penggunaan nama keluarga jika didapati dua atau lebih individu dengan nama keluarga yang sama dan duduk di dewan direksi atau dewan komisaris di perusahaan yang sama, kondisi ini mengindikasikan adanya hubungan keluarga dan dapat dipertanggungjawabkan apabila ditemukan hal tersebut. Perusahaan yang dikontrol keluarga memiliki banyak kelebihan antara lain : dapat meminimalkan benturan kepentingan antara pemilik dan manajemen (*agency problems*), menjaga kinerja dan kelanggengan perusahaan demi impian mereka “bertahan hingga tujuh turunan”, dan keluarga dapat mengelola bisnis perusahaan secara lebih baik atas pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, peningkatan kepemilikan saham keluarga akan mengurangi kebutuhan investor untuk memantau manajemen perusahaan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk pengungkapan keuangan. Disisi lain, kepemilikan yang tinggi juga dapat mengakrabkan pihak keluarga dengan manajemen perusahaan yang menyebabkan adanya masalah asimetri informasi antara pihak keluarga dan investor luar. Ketika keputusan investasi lebih mungkin dibuat untuk memaksimalkan kekayaan pihak keluarga dengan mengorbankan investor luar, investor luar akan merasa perlu untuk mengawasi manajer dengan meningkatkan tingkat pengungkapan keuangan.

Menurut Chau dan Gray (2010) perusahaan yang dikontrol oleh keluarga memiliki sedikit motivasi untuk mengungkapkan informasi melebihi persyaratan wajib. Perusahaan keluarga cenderung hanya melakukan pengungkapan yang bersifat wajib yang diatur dalam regulasi. Kepemilikan saham keluarga yang mendominasi di perusahaan membuat tingkat keterbukaan informasi kepada

publik relatif lemah jika dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar. Alasan mendasarnya adalah bahwa anggota keluarga, baik anggota dewan maupun pemegang saham perusahaan, memiliki akses langsung terhadap informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan sehingga mereka kurang membutuhkan pengungkapan (Chau dan Gray, 2010). Informasi yang tidak terlalu banyak diungkapkan akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antara pemegang saham *insider* dan *outsider*.

Kepemilikan saham oleh pihak keluarga (*insider*) bertindak sebagai pemegang saham pengendali dan pemegang saham yang bukan keluarga (*outsider*) sebagai pemegang saham minoritas. Kesenjangan informasi terjadi karena pihak dalam atau pemegang saham keluarga (pengendali) lebih banyak mengetahui informasi atas perusahaan dibandingkan pemegang saham yang bukan keluarga. Dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas, pemegang saham yang bukan keluarga mendapatkan informasi yang diperlukan dan dapat secara efektif memantau agar kepentingan ekonomi mereka dioptimalkan.

## **5. Ukuran Dewan Direksi**

Ukuran dewan direksi dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi perusahaan. Ukuran dewan direksi adalah jumlah direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif di dewan perusahaan. Teori agensi menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi yang besar dapat memainkan peran penting dalam memantau dewan direksi dan dalam membuat keputusan jangka panjang (Elfeky, 2017). Selain itu, jumlah dewan direksi yang besar

menyebabkan peningkatan variasi keahlian di dewan termasuk keahlian pelaporan keuangan (Laksmana, 2008).

Ukuran dewan direksi yang besar memungkinkan beragam pengalaman dan pendapat yang berpotensi meningkatkan kapasitas pengawasan dewan, sehingga menyiratkan pengungkapan lebih sukarela (Gandia, 2008 ). Perusahaan dengan dewan direksi skala besar kemungkinan akan secara sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan mereka di setiap tahun dan situs website (Elfeky, 2017). Sebaliknya Cheng dan Courtenay, (2006) berpendapat bahwa ukuran dewan direksi yang besar mungkin akan memiliki efek negatif terhadap kinerja dewan direksi.

Menurut teori agensi, jumlah dewan direksi yang besar cenderung melakukan korupsi dan berkinerja buruk, sementara jumlah dewan direksi yang lebih kecil relatif efektif dan baik dalam hal mempromosikan kinerja dan pengungkapan (Jensen dan Meckling, 1976). Namun, beberapa penelitian terbaru telah mengaitkan jumlah dewan direksi yang besar dengan pengungkapan risiko yang lebih besar (Elshandidy dan Neri, 2015; Allegrini dan Greco, 2013).

## **6. Proporsi Direktur Independen**

Dewan direktur memberikan pemantauan terhadap perusahaan karena dipilih oleh pemegang saham untuk memantau kepentingan mereka. Dewan direktur adalah mekanisme pengendalian internal pusat untuk memantau manajer (Uyar *et al.*, 2014). Direktur dapat dianggap sebagai “wasit profesional

yang tugasnya adalah untuk merangsang dan mengawasi persaingan di antara manajemen puncak perusahaan” (Fama, 1980).

Salah satu variabel yang semakin banyak digunakan dalam penelitian pengungkapan baru-baru ini adalah rasio direktur independen di struktur dewan. Direktur independen yang terdapat di struktur dewan dapat meningkatkan viabilitas dewan sebagai kontrol internal (Fama, 1980), mengurangi biaya agensi dan menciptakan tekanan untuk pengungkapan lebih baik (Forker, 1992). Umumnya, istilah ‘direktur non-eksekutif independen’ (Chau dan Gray, 2010; Sahama *et al.*, 2014), ‘direktur independen’ (Alves *et al.*, 2012; Elfeky, 2017), dan ‘direktur non eksekutif’ (Alhazaimah *et al.*, 2014) secara bergantian digunakan untuk mendefinisikan variabel ini. Jika direktur independen di dewan benar-benar melakukan peran pengawasan, tata kelola perusahaan yang baik diperkuat, efektifitas dewan ditingkatkan, kualitas pengungkapan ditingkatkan dan lebih banyak pengungkapan informasi yang diharapkan (Chau dan Gray, 2010).

Proporsi dari direktur independen yang lebih tinggi di dewan perusahaan harus menghasilkan pemantauan oportunistik manajerial yang lebih efektif (Chau dan Leung, 2006). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dewannya didominasi oleh direktur independen diharapkan untuk mengungkapkan banyak informasi dengan lebih sukarela. Hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten dalam kaitannya dengan hubungan antara proporsi direktur independen di struktur dewan dan tingkat pengungkapan sukarela.

Dengan demikian, peneliti berharap direktur independen untuk memberikan pengaruh yang lebih besar pada keputusan manajemen dalam mengungkapkan informasi secara sukarela kepada investor luar ketika proporsi mereka di dewan lebih tinggi. Sebagai contoh, Chau dan Gray (2010), Uyar *et al.*, (2014), Sahama *et al.*, (2014), Barros *et al.*, (2013), dan Elfeky (2017) memberikan dukungan untuk hubungan positif antara proporsi direktur independen di dewan dan tingkat pengungkapan sukarela yang komprehensif. Namun, Khalldon (2015) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara proporsi direktur independen dengan tingkat pengungkapan sukarela. Alves *et al.*, (2012) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara proporsi direktur independen di dewan dengan tingkat pengungkapan sukarela.

### B. Penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela, antara lain :

**Tabel 3. Penelitian yang Relevan**

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1	Dulacha G. Barako, Phil Hancock and H. Y. Izan, 2006	<i>Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies</i>	Kehadiran komite audit, dan proporsi direktur non-eksekutif independen di dewan ditemukan secara signifikan terkait negatif dengan tingkat pengungkapan sukarela. tingkat kepemilikan institusional dan asing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap sukarela penyingkapan.
2	Gerald Chau dan Sidney J. Gray, 2010	<i>Family ownership, board independence and voluntary disclosure: Evidence from Hong Kong</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kepemilikan saham keluarga tingkat menengah hingga rendah (25% atau kurang), efek konvergensi minat menjadi dominan dan tingkat

			<p>pengungkapan sukarela lebih rendah. Pada tingkat kepemilikan saham keluarga yang tinggi (di atas 25%), efek entrenchment menjadi dominan dan menyebabkan tingkat pengungkapan sukarela meningkat.</p> <p>proporsi direktur non-eksekutif dan direktur independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.</p>
3	Marco Allegrini dan Giulio Greco, 2011	<i>Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: evidence from Italian Listed Companies</i>	<p>Ukuran dewan dan ketekunan dewan menunjukkan hubungan positif dengan pengungkapan sukarela.</p> <p>dewan komite, komposisi dewan dan kehadiran dalam rapat tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pengungkapan sukarela</p>
4	H. Alves,, A.M. Rodrigues, N. Canadas, 2012	<i>Factors influencing the different categories of voluntary disclosure in annual reports: An analysis for Iberian Peninsula listed companies</i>	<p>Ukuran perusahaan, kinerja perusahaan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pengungkapan sukarela.</p> <p>independensi dewan dan ukuran dewan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela</p>
5	Ali Uyar, Merve kilic, dan Nizamattin Bayyurt, 2013	<i>Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from Turkish listed companies</i>	<p>Ukuran perusahaan, ukuran KAP, proporsi direktur non-eksekutif independen, kepemilikan institusional, dan indeks tata kelola perusahaan di Istanbul berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi sukarela. Sedangkan <i>leverage</i>, dan <i>ownership dispersion</i> berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi sukarela. Sementara Profitabilitas, umur <i>listing</i> perusahaan dan ukuran dewan memiliki pengaruh yang tidak signifikan.</p>

6	Samaha, K., Khlif, H., and Hussainey, K.2014	<i>The Impact of Board and Audit Committee Characteristics on Voluntary Disclosure: A Meta-Analysis</i>	Hasil penelitian memberikan bukti bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan direksi , proporsi direktur non-eksekutif, komite audit terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan dualitas CEO memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela
7	Khaldoon Albitar, 2015	<i>Firm Characteristic, Governance Attributes and Corporate Voluntary Disclosure: A Study of Jordanian Listed Companies</i>	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , umur <i>listing</i> , profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Sementara direksi independen dan struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi sukarela.
8	Mostafa I. Elfeky,2017	<i>The extent of voluntary disclosure and its determinants in emerging markets: Evidence from Egypt</i>	Hasil penelitian memberikan bukti signifikan positif antara ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, <i>leverage</i> perusahaan, direksi independen dalam dewan, dan tipe auditor, dan tingkat pengungkapan sukarela. Namun, korelasi signifikan negatif ditemukan antara kepemilikan Block-holder dan pengungkapan sukarela, sementara tidak ada korelasi signifikan yang ditemukan antara ukuran dewan, dan Dualitas dalam posisi, dan keseluruhan tingkat pengungkapan sukarela
9	Syeliya Md Zaini, Umesh Sharma, Grant Samkin, Howard Davey, 2018	<i>Impact of ownership structure on the level of voluntary disclosure: A study of listed family- controlled companies in malaysia</i>	Temuan analisis konten menunjukkan bahwa perusahaan yang dikendalikan keluarga cenderung memberikan informasi sukarela tambahan. Perbedaan dalam praktik pengungkapan sukarela dalam

			perusahaan yang dikendalikan keluarga menunjukkan bahwa efek entrenchment hadir.
--	--	--	--

### C. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan evaluasi atas penelitian diatas, maka hubungan variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh kepemilikan keluarga Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Suatu perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga jika keluarga tersebut merupakan *controlling shareholders*, atau mempunyai saham setidaknya 20% dari *voting right* dan merupakan pemilik saham tertinggi dibandingkan dengan *shareholders* lainnya. Dalam situasi kepemilikan keluarga yang sangat terkonsentersasi, dampak pada pengungkapan sukarela lebih rumit dan bisa dilihat dari dua perspektif seperti yang disarankan dalam literatur yaitu, konvergensi kepentingan dan *entrenchment manajement* (Morck *et al.*, 1988).

Ketika kepemilikan saham pemilik signifikan, konvergensi kepentingan antar pemilik dan investor luar terjadi karena pemilik lebih tidak mungkin untuk bertindak secara oportunistik karena mereka menanggung lebih banyak konsekuensi dari perilaku maksimalisasi nilai non-perusahaan mereka (Jensen dan Merckling, 1976). Dengan demikian, ini mendukung argumen bahwa tingkat konflik antara pemilik-manajer dan investor luar berkurang ketika kepemilikan pemilik-manajer terhadap perusahaan meningkat. Dengan demikian kebutuhan untuk pengungkapan sukarela berkurang.

Penelitian sebelumnya (Wright *et al.*,1996; Chau dan Gray,2010; Zaini *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa ketika pihak keluarga memiliki kepemilikan saham dalam jumlah besar di perusahaan mereka, mereka akan mengutamakan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, keputusan pemilik-manager kemungkinan akan dibuat untuk menguntungkan kekayaan pribadi pemilik dan pengambilalihan pemegang saham minoritas oleh pemilik pengendali dapat terjadi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah :

H1 : kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

## **2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela**

Coles *et al.*, (2008) menyatakan bahwa perusahaan besar dan beragam cenderung menggunakan jumlah direktur yang lebih besar dalam struktur dewan mereka untuk tujuan pemantauan dan pemberian saran. Lynck *et al.*, (2008) mengemukakan bahwa struktur dewan di seluruh perusahaan konsisten dengan biaya dan manfaat dari peran pengawasan dewan, bertentangan dengan pendapat umum bahwa dewan yang lebih kecil dan lebih mandiri adalah struktur tata kelola yang lebih disukai.

Alves *et al.*, (2012) berpendapat bahwa ukuran dewan yang lebih besar dapat berkontribusi lebih baik terhadap konflik-konflik distribusi yang dikurangi antara pemilik, orang dalam dan minoritas. Ukuran dewan direksi yang besar memungkinkan beragam pengalaman dan pendapat yang berpotensi

meningkatkan kapasitas pengawasan dewan, sehingga menyiratkan pengungkapan lebih sukarela (Gandia, 2008). Perusahaan dengan dewan direksi skala besar kemungkinan akan secara sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan tahunan di setiap tahun dan di situs website perusahaan (Elfeky, 2017). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

H2 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela

### **3. Pengaruh Proporsi Direktur Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela**

Direktur non-eksekutif independen dapat dianggap sebagai “wasit profesional yang tugasnya adalah untuk merangsang dan mengawasi persaingan di antara manajemen puncak” (Fama, 1980). Proporsi dari direktur independen yang lebih tinggi di dewan perusahaan harus menghasilkan pemantauan optimisme manajerial yang lebih efektif (Chau dan Leung, 2006). Jika direktur independen di dewan benar-benar melakukan peran pengawasan, tata kelola perusahaan yang baik diperkuat, efektifitas dewan ditingkatkan, kualitas pengungkapan ditingkatkan dan lebih banyak pengungkapan informasi yang diharapkan (Chau dan gray 2010). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dewannya didominasi oleh direktur independen diharapkan untuk mengungkapkan banyak informasi dengan lebih sukarela. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah :

H3 : Proporsi direktur independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

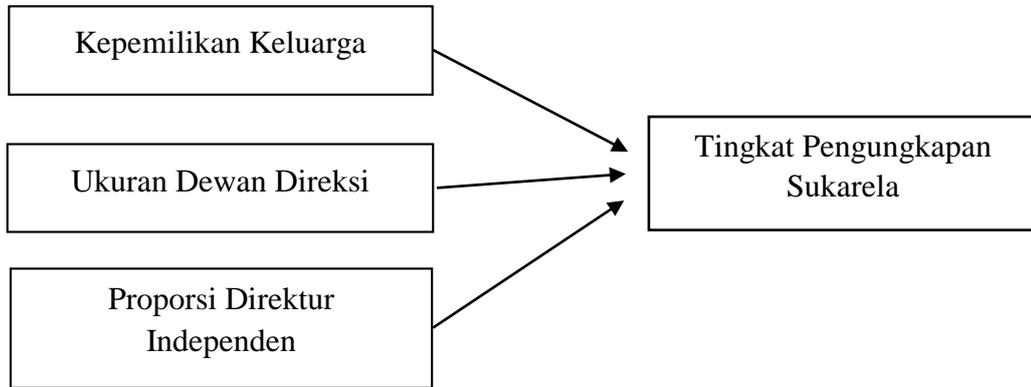
#### **D. Kerangka Konseptual**

Para investor membutuhkan informasi untuk menilai kualitas kinerja perusahaan di masa sekarang dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut terkandung dalam laporan tahunan yang disajikan perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib yang diberikan perusahaan dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut secara sukarela.

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian sebelumnya perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi lebih tinggi cenderung lebih banyak menarik perhatian investor karena para investor merasa lebih banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan tersebut dan dapat memprediksi risiko-risiko yang ada dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut dan telaah pustaka, serta beberapa penelitian terdahulu yang telah diungkapkan di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga, ukuran dewan direksi dan proporsi direktur independen. Dari penjelasan diatas, maka secara

sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut

:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kepemilikan keluarga, ukuran dewan direksi dan proporsi direktur independen terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 - 2017. Semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak keluarga maka perusahaan akan sulit untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela dimana manajemen perusahaan hanya memilih informasi-informasi yang akan memberikan reaksi positif dari pihak yang berkepentingan.
2. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 - 2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi maka akan semakin banyak mengungkapkan informasi-informasi secara sukarela melebihi apa yang telah ditetapkan dalam peraturan.

3. Proporsi direktur independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 - 2017.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan terdapatnya unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan.
2. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat memilih sampel yang tepat, sehingga peneliti akan memperoleh data yang memenuhi kriteria untuk diuji. Namun, penggunaan metode *purposive sampling* berakibat pada kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.
3. Nilai *adjusted R Square* yaitu sebesar 4,7% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan.
4. Tahun pengamatan penelitian ini masih terlalu singkat yaitu 2015 sampai 2017. Hal ini dikarenakan penulis kekurangan informasi mengenai tanggal

publikasi laporan tahunan perusahaan yang dijadikan dasar untuk penghitungan pengungkapan sukarela.

### **C. Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti judul yang sama sebaiknya mempertimbangkan dan mencari variabel independen lain yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela, seperti : *entranchment manajement*, konvergensi kepentingan, kepemilikan publik, profitabilitas, *leverage*, dan lain-lain serta mencari variable pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penilaian tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan laporan selain laporan tahunan seperti prospektus, laporan berkelanjutan dan lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian tidak hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur saja, tetapi menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhazaimeh, Amer., Ravindran, Palaniappan., and Mahmoud Almsafir. 2014. "The Impact of Corporate Governance and Ownership Structure on Voluntary Disclosure in Annual Reports among Listed Jordanian Companies". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Vol. 129 .341 – 348.
- Allaya, Manel., Imen, Derouiche., and Anke, Muessig. 2018."Voluntary disclosure, ownership structure, and corporate debt maturity: A study of French listed firms". *International Review of Financial Analysis*.
- Allegrini, M., and Greco, G. 2011. "Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence from Italian Listed Companies". *Journal of Management & Governance*. Vol. 17 No. 1. 187–216.
- Al-Shammari, B., and Al-Sultan, W. 2010. "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Kuwait". *International Journal of Disclosure and Governance*, Vol. 7 No 3. 262–280.
- Alves, H., Rodrigues, A.M., and Canadas, N.. 2012."Factors influencing the different categories of voluntary disclosure in annual reports: An analysis for Iberian Peninsula listed companies". *Tekhne Review of Applied Management Studies*.Vol.10. 15-26.
- Anderson, R. C., and Reeb, D. M. 2004. "Board composition: Balancing family influence in S&P 500 firms". *Administrative Science Quarterly*. Vol. 49 No. 2. 209–237.
- Arcay, M. R. B., and Vazquez, M. F. M. 2005. "Corporate characteristics, governance rules and the extent of voluntary disclosure in Spain". *Advances in Accounting*. Vol. 21. 299–331.
- Arifin. 2003. "The Relationship Between Corporate Governance Struktur And The Level Of Voluntary Disclosure". *Jurnal Bisnis Strategi*. Vol. 12.
- Ayub, M. 2008. Pengaruh Family Ownership terhadap Cost of Debt. Tesis Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Barako, D.G., Hancock, P., and Izan, H.Y. 2006. "Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies". *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 14 No. 2. 107-125.
- Barros, C., Boubaker, S., and Hamrouni, A. 2013. "Corporate governance and voluntary disclosure in France". *The Journal of Applied Business Research*, Vol. 29 No. 2. 561-578.
- Bertrand, Marianne., and Schoar, Antoinette. 2006. "The Role of Family in Family Firms". *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 20 No. 2. 73–96.
- Bitektine, Alex. 2011. "Toward A Theory Of Social Judgments Of Organizations: The Case Of Legitimacy, Reputation, And Status" *Academy Of Management Review*. Vol. 36, No. 1, 151–179.

- Botosan, C.A. 1997. "Disclosure level and the cost of equity capital". *The Accounting Review*. Vol. 72 No. 3. 323-349.
- Chau, G. K., and Gray, S. J. 2002. "Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore". *The International Journal of Accounting*. Vol. 37. 247-265.
- Chau, G., and Gray, S.J. 2010. "Family ownership, board independence and voluntary disclosure: Evidence from Hong Kong". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. Vol. 19. 93-109.
- Chau, Gerald., and Leung, Patrick. 2006. "The Impact Of Board Composition And Family Ownership On Audit Committee Formation: Evidence From HongKong". *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation*. Vol. 15. 1-15.
- Cheng, E. C. M., and Courtenay, S. M. 2006. "Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure". *The International Journal of Accounting*. Vol. 41 No. 3. 262-289.
- Chung, Huimin, Judge, William Q., and Li, Yi-Hua. 2015. "Voluntary Disclosure, Excess Executive Compensation, and Firm Value". *Journal of Corporate Finance*. doi: [10.1016/j.jcorpfin.2015.04.001](https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.04.001).
- Claessens, S., Djankov, S., and Lang, L.H. 2000. "The separation of ownership and control in East Asian corporations". *Journal of Financial Economics*. Vol. 58.81-112.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J.P., and Lang, L.H. 1999. "Expropriation of minority shareholders: evidence from East Asia". *Policy Research paper 2088*.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J.P., and Lang, L.H. 2002. "Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings". *The Journal of Finance*. Vol. 57. 2741-2771.
- Coles, J. L., Daniel, N. D., and Naveen, L. 2008. "Boards: Does one size fit at all?". *Journal of Financial Economics*. Vol. 87. 329-356.
- Comyns, Breeda., Figgea, Frank., Hahna, Tobias., and Barkemeyer, Ralf . 2013. "Sustainability reporting: The role of "Search", "Experience" and "Credence" information". *Accounting Forum*. Vol. 37. 231-243.
- Elfeky, MI. 2017. "The extent of voluntary disclosure and its determinants in emerging markets: Evidence from Egypt". *The Journal of Finance and Data Science*.
- Elshandidy. and Neri. 2015. "Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, And Market Liquidity: Comparative Evidence From The Uk and Italy". *Wiley Online Library*
- Fama, E., and Jensen, M. 1983. "Separation of ownership and control". *The journal of law and Economics*. Vol. 26 No. 2. 301-326.

- Fama, E.F. 1980. "Agency problems and theory of the firm". *Journal of Political Economy*. Vol. 88 No. 2. 288-307. <http://dx.doi.org/10.1086/260866>
- Ferdinal, M. Ferry. 2012. "Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan Sukarela dengan Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi" Skripsi. Universitas Indonesia.
- Forker, J.J. 1992. "Corporate governance and disclosure quality". *Accounting and Business Research*. Vol. 22 No. 86). 111-124.
- Gandía, Juan. L. 2008."Determinants Of Internet-Based Corporate Governance Disclosure By Spanish Listed Companies". *Online Information Review*, Vol. 32 No. 6 . 791 – 817.
- Ghazali, N., and Weetman, P. 2006. "Perpetuating traditional influences: Voluntary disclosure in Malaysia". *Journal of International Accounting Auditing and Taxation* Vol. 15 No. 2. 226 – 248.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. BPFU Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hidalgo, R., García Meca, E. and Martínez, I. 2011. "Corporate governance and intellectual capital disclosure". *Journal of Business Ethics*, Vol.100 No. 3. 483-495.
- Idris. 2010. "Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS Edisi Revisi III". Padang: Fakultas Ekonomi UNP.
- Jankensgard, Hakan. 2017. "Between A Rock and A Hard Place: New Evidence on The Relationship Between Ownership and Voluntary Disclosure". *International Review of Financial Analysis*.
- Jensen, M., and Meckling, W. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(2), 305-360
- Khaldoon, Albitar. 2015. "Firm Characteristic, Governance Attributes and Corporate Voluntary Disclosure: A Sudy of Jordanian Listed Companies". *International Business Research* Vol.8 No. 3.
- Laksmna, I. 2008. "Corporate board governance and voluntary disclosure of executive compensation practices". *Contemporary Accounting Research*, Vol. 25 No. 4. 1147–1182.
- Lemmon, Michael L., and Lins, Karlv. 2003. "Ownership Structure, Corporate Governance, And Firm Value: Evidence From The East Asian Financial Crisis". *The Journal Of Finance*. Vol. 58 No. 4.
- Lynck, J. S., Netter, J. M., and Yang, T. 2008. "The determinants of board structure". *Journal of Financial Economics*. Vol. 87. 308–328.
- Manuel, Jose., *et al.*, 2010. "The Role Of The Board Of Directors In Disseminating Relevant Information On Greenhouse Gases". *Journal Of Business Ethics*. Vol. 97. 391–424.

- Maskhiyah, Umi. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Morck, R.K., Shleifer, A., and Vishny, R., 1988. "Management ownership and market valuation: An empirical analysis". *Journal of Financial Economics* Vol. 20, 293–315.
- Oliveira, Lidia., and Rodrigues, Lucia Lima. 2006. Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*. Vol. 10 No. 1. 11-33.
- Salvato, Carlo., And Moores, Ken. 2010. "Research On Accounting In Family Firms: Past Accomplishments And Future Challenges". *Family Business Review*. Vol. 23 No. 3.193–215.
- Samaha, K., Khlif, H., and Hussainey, K.,The. 2014. "Impact of Board and Audit Committee Characteristics on Voluntary Disclosure: A Meta-Analysis". *Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers*.
- Scherer, A. G., Palazzo, G., and Seidl, D. 2013. "Managing legitimacy in complex and heterogeneous environments: Sustainable development in a globalized world.*Journal of Management Studies*. Vol. 50 No. 2. 259–284. <https://doi.org/10.1111/joms.12014>.
- Scherer, *et al.* 2013. "Managing Legitimacy In Complex and Heterogeneous Environments: Sustainable Development In A Globalized World". *Journal Of Management Studies*. Vol. 50 No. 2.
- Sehar, Najm-UI, *et al.* 2013. "Determinants Of Voluntary Disclosure In Annual Report: A Case Study of Pakistan". *Manajement and Administrative Sciences review* ISSN: 2308-1368. Vol 2. Issue 2 . Pages 181-195.
- Sharma, Umesh., and Davey Howard. 2013. "Voluntary disclosure in the annual reports of Fijian Companies". *International Journal Economics and Accounting*. Vol. 4. No. 2.
- Sudarmadji, Ardi Murdoko., dan Sularto, Lana . 2007. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Laverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan". *Proceeding Pesat( Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek , Dan Sipil)*. Vol. 2.
- Sugiarto. 2009. Struktur Modal,Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Asimetri. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistyanto, H. Sri. 2008. Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi Dengan SPSS. CV, Andi Offset:Yogyakarta.
- Suwardjono. 2014. Teori Akuntansi: "Perekayasa Pelaporan Keuangan". Yogyakarta: Badan Penerbit FE UGM.

- Tabalujan, Benny. S . 2002. "Family Capitalism and Corporate Governance of Family-Controlled Listed Companies in Indonesia". *UNSW Law Journal*. Vol. 25 No. 2.
- Umi, Maskhiyah. 2009. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI". Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Uyar, A., Kilic, M., and Bayyurt, N. 2013. "Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from Turkish listed companies". *Intangible Capital*, Vol. 9 No. 4.
- Wiranata, Y.A., dan Nugrahanti, Y.W. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15 No. 1. 15-16.
- Wiranata, Yulius Ardy., dan Nugrahanti, Yeterina Widi. 2013. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 15. No. 1.15-26.
- Wright, P., Ferris, S. P., Sarin, A., and Awasthi, V. 1996. "Impact of corporate insider, blockholder and institutional equity ownership on firm risk taking". *Academy of Management Journal*. Vol. 39. 441–463.
- Yekini, Kemi. C., Ismail, Adelopo., Panagiotis, Andrikopoulos., and Sina, Yekini. 2015. "Impact of board independence on the quality of community disclosures in annual reports". *Accounting Forum*.
- Yesi, Wulandari. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela". Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Zaini, S.M., Sharma, Umesh. Samkin, Grant. and Davey, Howard. 2018. "Impact of ownership structure on the level of voluntary disclosure: A study of listed family-controlled companies in Malaysia". *Accounting Forum*.
- Zellweger, *et al.* 2012. "Building A Family Firm Image: How Family Firms Capitalize on Their Family Ties". *Journal Of Family Business Strategy*. Vol. 3. 239–250.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.  
<http://www.idx.co.id>. Diakses February 2019